



ANALISIS POTENSI LOKAL DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN KENDAL DALAM UPAYA MEWUJUDKAN *BLUE ECONOMY*

Karina Fitria Apriliani✉

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Februari 2014
Disetujui Maret 2014
Dipublikasikan April 2014

Keywords:
Wilayah Pesisir, Upaya
Menghadapi Blue Economy

Abstrak

Kabupaten Kendal merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki wilayah pesisir dengan luas 42km. Wilayah pesisir Kendal sangat potensial, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Masyarakat pesisir Kendal masih cenderung miskin dan sumber daya manusia rendah. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan adanya kesiapan dalam mewujudkan konsep baru *Blue Economy*. *Blue economy* adalah konsep baru dalam rangka pengembangan wilayah pesisir.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan program alternatif mana yang dapat diprioritaskan Kabupaten Kendal dalam upaya mewujudkan *Blue Economy*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari hasil pengisian kuesioner oleh pihak dinas terkait dan para nelayan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kendal dan jurnal serta literatur yang berkaitan dengan penelitian. Metode analisis yang digunakan yaitu *Analytical Hierarki Process* (AHP) yang diolah menggunakan *expert choice versi 9.0* dan *Analisis Statistik Deskriptif*.

Kriteria urutan program yang diprioritaskan dalam upaya mewujudkan *Blue Economy* adalah kriteria pemberdayaan masyarakat, optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, dan peningkatan hasil perikanan. Ketiga hal tersebut berkaitan dengan kesiapan untuk mewujudkan *Blue Economy*. Potensi-potensi yang ada di wilayah pesisir Kendal cukup banyak dilihat dari potensi wisata, perikanan dan kelautan, industri, perdagangan.

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, prioritas dari seluruh alternatif program adalah program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan. Saran yang dapat disampaikan untuk upaya menghadapi *Blue Economy* adalah adanya pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir. Hal ini dilakukan agar masyarakat pesisir lebih mudah untuk diberdayakan melalui berbagai arahan dan penyuluhan terkait dengan pemanfaatan sumber daya kelautan serta pelatihan-pelatihan dalam pengolahan ikan.

Abstract

Kendal is one of regencies in Central Java, which has a vast coastal area with 42km. Kendal potential coastal areas, but has not been used optimally. Kendal coastal communities still to be poor and low human resource. One way that can be done to overcome this is by the readiness in realizing a new concept *Blue Economy*. *Blue economy* is a new concept for the development of coastal areas.

This study aims to determine which alternative programs that can be prioritized in efforts to achieve Kendal *Blue Economy*. The data used in this study are primary and secondary data. The primary data sourced from the results of the questionnaire by the relevant agencies and the fishermen. Secondary data for this study were obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and the Central Java Province Kendal and journals and literature related to the research. The analytical method used is *Analytical Hierarchy Process* (AHP) which is processed using *expert choice version 9.0 Descriptive Statistics and Analysis*.

Criteria are prioritized sequence of courses in an effort to realize the *Blue Economy* is the empowerment criteria, the optimization of the management and marketing of fishery production, and enhancement of fishery products. These three things are related to readiness to realize the *Blue Economy*. Potentials that exist in coastal areas Kendal seen quite a lot of potential for tourism, fishery, industry, trade.

Based on the conclusions of this study, the priority of the whole program is an alternative program of community empowerment in supervision and controlled marine resources. Suggestions can be submitted to attempt to deal with the *Blue Economy* the presence of a group of economic development of coastal communities. This is done so that it is easier to coastal communities empowered through various referrals and counseling related to the use of marine resources as well as training in fish processing.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Gedung C6 Lantai 1 FE Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: edaj_unnes@yahoo.com

ISSN 2252-6765

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kawasan pesisir sangat luas, karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai mencapai sepanjang 104.000km serta memiliki potensi untuk pengembangan dan pemanfaatannya. Dalam mencermati pembangunan Indonesia selama ini, secara empiris pembangunan kelautan dan perikanan kurang mendapat perhatian dan diposisikan sebagai pinggiran dalam pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat 70% wilayah Indonesia merupakan lautan yang mempunyai potensi ekonomi sangat besar.

Daerah pesisir merupakan wilayah yang penting apabila ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial ekonomi, nilai daerah pesisir terus bertambah. Pada dasarnya daerah pesisir mempunyai potensi serta sumber daya yang melimpah, oleh karena itu seharusnya masyarakat pesisir lebih sejahtera dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Namun pada kenyataan masih banyak masyarakat yang tertinggal. Kehidupan masyarakat pesisir dan keluarga nelayan belum bisa dikatakan sejahtera bahkan mereka dilanda kemiskinan. Hal ini mengakibatkan generasi dari mereka yang tidak bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi, sehingga anak-anak yang seharusnya belum memasuki usia angkatan kerja sudah harus melakukan pekerjaan yang

membebani mereka untuk menambah nafkah dalam kerluarga. Adanya permasalahan seperti ini mengakibatkan kualitas sumber daya manusia tetap rendah dan juga kemiskinan yang berkelanjutan dikalangan nelayan atau masyarakat pesisir.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menunjuk wilayah pesisir Kendal dengan kriteria lokasi rawan bencana dan perubahan iklim, mempunyai potensi ekonomi lokal unggulan, masyarakat pesisir masih miskin namun potensial aktif dan memiliki motivasi untuk memperbaiki kehidupannya, kondisi lingkungan permukiman kumuh. Kabupaten Kendal merupakan satu-satunya wilayah pesisir di Jawa Tengah yang memiliki kriteria tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini dipilih Kabupaten Kendal sebagai wilayah yang akan diteliti kaitannya dengan *Blue Economy*. Pesisir utara Kabupaten Kendal merupakan salah satu daerah pesisir di Jawa Tengah. Terdapat tujuh kecamatan yang merupakan bagian dari pesisir, dengan total panjang pantai yaitu 42km. Kabupaten Kendal mempunyai peringkat kedelapan dari 17 wilayah pesisir di Jawa Tengah untuk luas laut yang dimiliki. Dengan demikian bisa diketahui bahwa daerah pesisir Kendal berpotensi untuk lebih dikembangkan lagi. Namun hasil perikanan tangkap di Kendal masih cenderung sedikit jika dibandingkan dengan beberapa Kabupaten yang memiliki panjang dan luas pantai lebih kecil. Dalam hal ini sangat diperlukan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Tabel 1
Produksi Perikanan Laut
Dirinci Menurut Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Kabupaten Kendal Tahun 2007 – 2011

No.	TPI	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
		Produksi (Kg)	Produksi (Kg)	Produksi (Kg)	Produksi (Kg)	Produksi (Kg)
1	Tanggul Malang	51.678	28.886	20.047	17.314	87.657
2	Bandengan	71.196	84.421	63.424	15.368	148.669
3	Tawang	471.065	400.705	457.690	579.086	537.239
4	Sendang Sikucing	538.474	613.151	779.988	774.345	938.203
	Jumlah	1.132.413	1.127.163	1.321.149	1.386.113	1.711.768

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal 2007-2011

Pada tabel 1 terlihat data dari produksi ikan laut wilayah pesisir Kendal. Berdasarkan tabel tersebut telah diketahui seberapa banyak dan seberapa besar potensi yang ada pada sumber daya kelautannya yaitu jumlah TPI, produksi perikanan laut. Produksi ikannya cenderung meningkat pada setiap tahun. Produksi ikan laut paling banyak di TPI Sendang Sikucing yaitu sebesar 938.203 kg pada tahun 2011. Hasil

produksi perikanan di Sendang Sikucing juga cenderung meningkat dan sedikit stabil dibandingkan dengan TPI lainnya yang masih fluktuatif hasilnya. Namun Kendal belum bisa mengoptimalkan potensi yang ada pada sumber daya kelautannya, sehingga untuk produksi hasil tangkapan laut di pesisir Kendal masih menduduki tingkat di bawah dari pesisir-pesisir lain yang lebih kecil.

Tabel 2
Produksi Tambak
Kabupaten Kendal

No.	Kecamatan	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
		Produksi (Kg)	Produksi (Kg)	Produksi (Kg)	Produksi (Kg)	Produksi (Kg)
1.	Kaliwungu	3.133.292	3.206.146	3.186.068	3.000.926	3.128.760
2.	Brangsang	516.592	494.027	667.654	618.045	626.930
3.	Kendal	859.904	778.620	763.659	695.468	755.100
4.	Patebon	1.157.034	1.238.782	1.557.325	1.061.670	1.120.945
5.	Cepiring	415.379	469.053	353.079	310.125	301.855
6.	Kangkung	243.278	229.307	368.787	368.360	326.616
7.	Rowosari	254.544	235.685	210.435	117.429	111.353
Jumlah		6.580.023	6.651.620	7.107.007	6.172.023	6.371.559

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kendal Tahun 2007-2011

Pada tabel 2 telah diketahui ada 7 kecamatan yang menghasilkan sumber daya perikanan. Produksi tambak yang paling banyak ada di kecamatan Kaliwungu. Di wilayah pesisir Kaliwungu tidak terdapat orang yang bermata pencaharian nelayan, melainkan bekerja sebagai pembudidaya ikan. Kangkung merupakan wilayah pesisir yang paling sedikit dalam memproduksi tambak. Produksi tambak dari masing-masing wilayah cenderung fluktuatif. Agar ada nilai tambah pada ikan, hasil tambak biasanya diolah kembali untuk dijadikan makanan. Dengan demikian akan semakin mendukung dan mengembangkan industri rumah tangga yang ada di sekitar wilayah pesisir. Namun data tersebut menunjukkan bahwa jumlah produksi tambaknya fluktuatif atau naik turun. Hal ini berarti dalam pengelolaan tambak harus ditingkatkan lagi agar bisa mempertahankan jumlah ataupun kualitas yang dihasilkan dari tambak tersebut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana potensi lokal yang ada pada wilayah pesisir Kendal?
2. Bagaimana program pengembangan wilayah pesisir Kendal yang dilakukan untuk mewujudkan *Blue Economy*?

LANDASAN TEORI

Karakteristik Masyarakat Pesisir

Dalam konteks masyarakat pesisir, masyarakat desa terisolasi (masyarakat pulau kecil) dan masyarakat desa pantai dapat dijadikan gambaran wujud dari suatu komunitas kecil yang memiliki beberapa ciri, yaitu : (1). Mempunyai ciri yang khas, (2) terdiri dari jumlah penduduk dengan jumlah yang cukup terbatas (*Smallness*) sehingga masih saling mengenal sebagai individu yang berkepribadian, (3) bersifat seragam dengan deferensiasi terbatas (*homogeneity*), dan (4) kebutuhan hidup penduduknya sangat terbatas, sehingga semua

dapat dipenuhi sendiri tanpa bergantung pada pasar diluar (Satria, 2002; 133).

Identifikasi Potensi Wilayah Pesisir

Indonesia merupakan negara yang memiliki garis pantai (pesisir) yang sangat besar. Oleh karena itu sumberdaya kelautan di Indonesia melimpah, sehingga merupakan aset wilayah yang strategis untuk dikembangkan dengan basis pada pemanfaatan sumberdaya kelautan dan jasa-jasa lingkungan lainnya. Karakter kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sangat khas dengan berbagai potensi yang mungkin dimilikinya (Budiharsono: 2001), seperti:

- a. Potensi Wisata
- b. Potensi Perikanan dan Kelautan
- c. Potensi Industri
- d. Potensi Perdagangan

Teori Lokasi

Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha/kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial (Tarigan, 2006:77).

Teori Tempat Sentral

Teori tempat sentral dikemukakan oleh Walter Christaller pada tahun 1933. Teori tempat sentral (*central place theory*) menganggap bahwa ada hirarki tempat (*hierarchy of place*). Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya. Tempat sentral tersebut suatu pemukiman yang menyediakan jasa – jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya (Cholique, 2007).

Model Gravitasi

Model gravitasi pertama kali dikenalkan oleh Carey dan Ravenstein adalah model yang paling banyak digunakan untuk melihat besarnya daya tarik suatu potensi yang berada pada suatu lokasi. Model ini sering digunakan untuk melihat kaitan potensi suatu lokasi dan besarnya wilayah pengaruh dari potensi

tersebut. Dalam perencanaan wilayah, model ini sering digunakan sebagai alat untuk melihat fasilitas kepentingan umum sudah berada pada tempat yang benar atau belum (Cholic 2007).

Pengembangan Sektor Sektor

Berdasarkan potensi sumber daya alam yang kita miliki, maka adanya sektor potensial di suatu daerah harus dikembangkan dengan seoptimal mungkin. Sampai dengan akhir dekade 1980-an, di Indonesia terdapat tiga kelompok pemikiran dalam kaitannya dengan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memantapkan keberadaan sektor industri (Arsyad, 1999:165).

Blue Economy

Beragam teori dan formula ditawarkan oleh pakar ekonomi di dunia, salah satunya adalah *Blue Economy*. *Blue Economy* mulai marak dibicarakan di Indonesia, karena Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya kelautannya. Gagasan mengenai *Blue Economy* dilontarkan oleh Prof. Gunter Pauli pada tahun 1994 ketika profesor asal Belgia ini diminta Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) untuk memaparkan model bisnis masa depan (Philip Rekdale: 2013). *Blue Economy* adalah konsep yang menjelaskan aktivitas ekonomi yang bukan saja mengurangi limbah, tetapi juga meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu juga diartikan sebagai Ekonomi Laut Biru yang menjadikan laut sebagai ekosistem yang harus dilindungi dan dioptimalkan kemanafaatannya dalam rangka meningkatkan ekonomi rakyat. Tujuan *Blue Economy* Indonesia adalah mencapai pembangunan nasional secara menyeluruh dengan memberdayakan unsur-unsur yang berkaitan dengan *Blue Economy* dan tetap menjaga kelestarian laut.

METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian langsung kepada dinas-dinas terkait dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data BPS (Badan Pusat Statistik) dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal.

Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah: Metode Observasi, Wawancara, dan metode kuesioner adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis, untuk dijawab secara tertulis oleh responden, pada kuesioner pertanyaan yang disampaikan adalah untuk memperoleh informasi dari responden.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu analisis *Analitycal Hierarchy Process* (AHP), yaitu suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki. Menurut Saaty (1993), hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal merupakan satu dari 35 kabupaten/kota yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, dengan posisi geografis berkisar antara 109° 40' – 110° 18' Bujur Timur dan 6° 32' – 7° 24' Lintang Selatan. Kabupaten Kendal terletak di jalur utama Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa. Wilayah perikanan laut

di Kabupaten Kendal meliputi pantai utara sepanjang 41km yang mencakup 7 kecamatan yaitu Kecamatan Kaliwungu, Brangsong, Kendal, Patebon, Cepiring, Kangkung, dan Rowosari. Ada beberapa indikator untuk melihat potensi di wilayah pesisir yaitu :

Potensi Wisata

Pemanfaatan sumber daya yang ada di pesisir tidak hanya melalui hasil perikanannya, namun juga bisa dimanfaatkan untuk bidang wisatanya. Karena dengan adanya wisata di wilayah pesisir, maka akan mendorong perkembangan wilayah dan juga pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kendal. Berikut adalah beberapa wisata pesisir yang ada di Kendal :

1. Pantai Muara Kencan di Kecamatan Patebon
2. Pantai Ngebum di Kecamatan Kaliwungu
3. Pantai Sendang Sikucing di Kecamatan Rowosari
4. Pantai Cahaya/The Sea di Kecamatan Rowosari (Penangkaran Satwa Langka sejenis mamalia air dan juga ada *Dolphin Therapy*).

Potensi Perikanan dan Kelautan

Hasil dari sumberdaya ini yaitu dari perikanan laut maupun ikan payau (tambak). Potensi ini merupakan salah satu potensi yang sangat mendukung pengembangan pada wilayah pesisir, sehingga harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Di Kendal sangat mempunyai potensi dalam dua hal tersebut. Berikut adalah hasil dari perikanan laut maupun tambak:

Tabel. 3
Produksi Perikanan Wilayah Pesisir
Kabupaten Kendal Tahun 2012

No.	Kecamatan	Ikan Laut (kg)	Tambak (kg)	Jumlah
1	Kaliwungu	-	3.150.850	3.150.850
2	Brangsong	-	641.660	641.660
3	Kota Kendal	103.496	802.640	906.136
4	Patebon	114.997	1.912.840	2.027.831
5	Kangkung	-	388.905	388.905
6	Cepiring	-	330.925	330.925
7	Rowosari	1.837.682	145.230	1.982.912

	Jumlah	2.056.175	7.373.050	9.429.219
--	--------	-----------	-----------	-----------

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal Tahun 2012

Berdasarkan tabel 3 produksi perikanan wilayah pesisir Kendal yang menghasilkan ikan laut paling banyak yaitu Kecamatan Rowosari sebesar 1.837.682 kg. Rowosari cukup potensial dalam menghasilkan perikanan laut, karena perbandingan Rowosari dengan Kota Kendal dan Patebon sangat jauh. Tidak hanya potensi kelautan saja, Rowosari juga mempunyai obyek wisata yang banyak menarik wisatawan lokal dan luar daerah. Penghasil tambak paling banyak adalah Kecamatan Kaliwungu, sebagian besar masyarakat pesisirnya berkonsentrasi pada

usaha tambak. Berbagai jenis ikan tawar dibudidayakan dan hampir semua lahan yang ada di wilayah pesisir Kaliwungu digunakan untuk tambak-tambak.

Potensi Industri

Hasil tangkapan ikan bisa diolah kembali menjadi bahan makanan atau makanan. Hal ini akan meningkatkan nilai tambah pada ikan dan juga akan tercipta inovasi-inovasi dan industri baru. Kendal memiliki beberapa industri pengolahan yang terkait dengan hasil perikanan. Berikut adalah beberapa industri rumah tangga pengolah ikan yang ada di Kendal:

Tabel. 4
Daftar Pengolah Hasil Perikanan
Kabupaten Kendal

No	Jenis olahan	Jumlah Pengolah	Jumlah Produksi (kg)	Nilai Produksi
1	Bandeng Presto	57	744.300	22.329.000.000
2	Pengasapan	98	2.268.000	68.040.000.000
3	Penggaraman	217	4.266.000	127.980.000.000
4	Pemindangan	610	13.142.400	190.564.800.000
5	Terasi	41	2.025	40.500.000
6	Bandeng Cabut Duri	35	78.576	3.143.040.000
7	Pengeber	119	2.659.500	**
	Jumlah	1177	23.160.801	412.097.340.000

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal Tahun 2013

**Data tidak tersedia

Pada tabel 4 terlihat bahwa hasil olahan yang paling banyak di produksi adalah pemindangan atau ikan pindang sebesar 13.142.400kg. Hal ini karena hampir setiap masyarakat di beberapa desa pesisir memproduksi ikan tersebut. Terasi merupakan hasil olahan ikan yang diproduksi paling sedikit sebesar 2.025kg, padahal jumlah pengolahnya lebih banyak dibandingkan dengan bandeng cabut duri 35 pengolah namun bisa menghasilkan 78.576kg produksinya. Hal ini dikarenakan bahan baku untuk membuat terasi lebih terbatas dibandingkan dengan bandeng.

Potensi Perdagangan

Hasil tangkapan ikan laut biasanya diperjualkan pada suatu tempat khusus yang disebut TPI (Tempat Pelelangan Ikan), selain itu juga di pasar-pasar tradisional. Sedangkan hasil olahan ikan dari industri rumah tangga biasanya diperjualkan melalui toko-toko atau pusat oleh-oleh. Hasil olahan ikan juga ada yang dikirim ke luar kota bahkan diekspor di beberapa negara lain. Berikut adalah hasil perikanannya:

Tabel. 5
Pemasaran Hasil Produksi Perikanan
Kabupaten Kendal

No	Jenis Komoditas	Nama Perusahaan/Pengusaha	Kapasitas Produksi (kg)	Pemasaran
1	Tepung Ikan	PT. Sinar Bahari Agung	779.000	Taiwan
2	Surimi	PT. Sinar Bahari Agung	2.543.000	China, Singapore, Taiwan, Malaysia, Hongkong,
3	Srimping	PT. Laut Jaya Abadi	6.104	China
4	Keong	PT. Laut Jaya Abadi	6.622	China
5	Pindang	610Industri Rumah Tangga	13.142.400	Dalam dan luar kota
6	Bandeng Presto	57Industri Rumah Tangga	744.300	Dalam dan luar kota
7	Ikan asin	217Industri Rumah Tangga	4.266.000	Dalam dan luar kota
8	Terasi	41Industri Rumah tangga	2.025	Dalam dan luar kota
9	Badeng Cabut Duri	35Industri Rumah Tangga	78.576	Dalam dan luar kota

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal Tahun 2013

Berdasarkan tabel 5 dapat terlihat bahwa ada 2 perusahaan yang bergerak di bidang ekspor. PT. Sinar Bahari Agung paling banyak mengekspor jenis olahan ikan surimi sebesar 2.543.000kg ke beberapa negara. Selain itu ada beberapa jenis olahan ikan yang pemasarannya hanya di dalam dan luar kota saja. Pindang merupakan jenis olahan ikan yang diproduksi paling banyak sebesar 13.142.400kg.

Hasil Analisis

Analisis Statistik Deskriptif

Dari hasil penelitian tentang umur responden dapat diketahui bahwa sebagian besar nelayan di Kabupaten Kendal berusia 41-55 tahun yaitu sebesar 54,45%, umur responden dapat mempengaruhi kemampuan fisik dalam bekerja. Sedangkan umur 40 ke bawah hanya berjumlah 18,18% yang bekerja sebagai nelayan. Usia di bawah 40 tahun merupakan usia produktif untuk mengembangkan sumber daya kelautan. Minat kerja sebagai nelayan usia muda di Kendal masih rendah, sehingga inovasi-inovasi dalam pemanfaatan hasil perikanan juga masih terbatas.

Dari data nelayan yang ada di Kabupaten Kendal sebagian besar nelayan tamat SD 67,67% artinya bahwa banyak nelayan yang tidak melaksanakan wajib belajar 9 Tahun. Tingkat pendidikan mempengaruhi pola pikir nelayan dalam pemanfaatan sumber dayanya. Sedangkan nelayan dengan tingkat pendidikan SMP hanya 22,22 % saja.

Wilayah pesisir Kabupaten Kendal menghasilkan beberapa hasil olahan ikan. Pindang merupakan jenis olahan yang paling banyak diproduksi yaitu sebesar 11.312.400 kg, karena disetiap wilayah pesisir Kendal memproduksi olahan ikan ini. Sedangkan jenis olahan balakutak (beku) merupakan olahan ikan yang paling sedikit jumlahnya. Hal ini dikarenakan belum banyak orang yang memiliki alat/kulkas pembeku ikan.

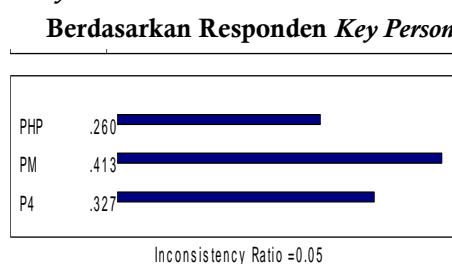
Analisis Hierarki Proses (AHP) Upaya Mewujudkan *Blue Economy*

Alternatif-alternatif kebijakan yang digunakan dalam upaya mewujudkan *Blue Economy* diperoleh dari hasil penelitian terdahulu dan program yang telah dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Kendal dalam

strategi pembangunan daerah pesisir. Berdasarkan penelitian dan strategi pembangunan pesisir Kendal maka dapat ditarik tiga kelompok strategi untuk mewujudkan *Blue Economy* yaitu dengan peningkatan hasil perikanan, pemberdayaan masyarakat, dan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan. Kelompok program yang pertama bertujuan untuk meningkatkan hasil perikanan, agar sumber dayanya bisa lebih dimanfaatkan secara baik dan maksimal. Kelompok kedua bertujuan agar bisa menggali potensi yang ada pada masyarakat pesisir, sehingga bisa lebih dikembangkan. Kelompok ketiga bertujuan agar bisa meningkatkan nilai tambah pada hasil ikan yang didapat.

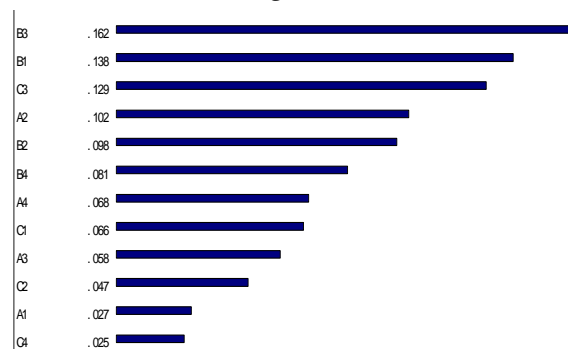
Analisis dalam penelitian ini yaitu analisis AHP berdasarkan responden *Key Persons*. Setelah diproses melalui *expert choice versi 9.0*. Tahap pertama, peringkat kriteria yang menjadi prioritas dalam upaya mewujudkan *Blue Economy* yang tertinggi adalah pemberdayaan masyarakat (PM) dengan bobot 0,413 dan *inconsistency ratio* 0,05 (dengan batas maksimal $\leq 0,1$) yang berarti bahwa hasil analisis tersebut teruji konsisten dan dapat diterima. Kemudian *key persons* memilih kelompok program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan (P4) sebagai kelompok terpenting kedua dengan bobot 0,327. Berikutnya, kelompok program peningkatan hasil perikanan (PHP) berada di peringkat ketiga yaitu dengan bobot 0,260 berada pada urutan terakhir.

Gambar 1
Urutan Kelompok dalam Strategi *Blue Economy*
Berdasarkan Responden *Key Persons*



Sumber: Output AHP, 2013

Hasil analisis keseluruhan menunjukkan bahwa skala prioritas kriteria dan alternatif dalam upaya mewujudkan *Blue Economy* melalui metode AHP berdasarkan keseluruhan responden *key persons* adalah sebagai berikut:



Gambar 2
Urutan Prioritas Seluruh Alternatif Program dalam Strategi Mewujudkan *Blue Economy* Berdasarkan Responden *Key Persons*

inconsistency ratio = 0,05

Sumber: Output AHP, 2013

Berdasarkan gambar 2 analisis tersebut memiliki nilai *inconsistency ratio* sebesar 0,05 yang berarti hasil analisis tersebut konsisten dan dapat diterima, dan dapat dilihat bahwa menurut responden *key persons* dari seluruh pilihan alternatif program dalam strategi mewujudkan *Blue Economy* yang paling tinggi prioritasnya adalah program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan (B3) dengan bobot 0,162 dari kelompok program pemberdayaan masyarakat. Hal ini sangat sesuai untuk upaya mewujudkan *Blue Economy*, karena dengan diberdayakannya masyarakat maka sumber daya manusia bisa lebih tegali potensinya dan menjadi siap untuk menjalankan konsep *Blue Economy*. Urutan kelompok dari yang tertinggi hingga terendah adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan (B3) dengan bobot 0,162.
2. Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir (B1) dengan bobot sebesar 0,138.

3. Pengembangan sarana prasarana pengolahan pemasaran hasil perikanan (C3) dengan bobot sebesar 0,129.
4. Pengembangan perikanan tangkap (A2) dengan bobot sebesar 0,102.
5. Pelayanan usaha dan pemberdayaan masyarakat (B2) dengan bobot sebesar 0,098.
6. Pendampingan program grameen bank pesisir (B4) dengan bobot sebesar 0,081.
7. Pengadaan alat bantu penangkapan ikan (A4) dengan bobot sebesar 0,068.
8. Pelatihan dan pengembangan pengolahan hasil perikanan (C1) dengan bobot sebesar 0,066.
9. Pengembangan kawasan budidaya air laut dan air tawar (A3) dengan bobot sebesar 0,058.
10. Pengembangan dan peningkatan produk bernilai tambah hasil perikanan (C2) dengan bobot sebesar 0,047.
11. Peningkatan budidaya perikanan (A1) dengan bobot sebesar 0,027.
12. Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan (C4) dengan bobot sebesar 0,025.

Pembahasan

Potensi yang ada di wilayah pesisir Kendal cukup banyak dan bermacam-macam. Mulai dari hasil kelautan dan perikanan yang melimpah, lalu potensi wisata yang berkaitan dengan pesisir. Terdapat banyak industri rumah tangga yang mengolah ikan laut maupun ikan tambak. Pangsa pasar dalam hasil olahan ikannya cukup bagus, karena diperdagangkan di wilayah lokal, luar daerah sampai ke luar negeri juga. Selain terdapat berbagai potensi, wilayah pesisir Kendal juga mempunyai masalah dalam beberapa hal. Diantaranya, masyarakat yang cenderung miskin, lingkungan yang kumuh, sumber daya manusia masih rendah, serta berbagai masalah dalam pemanfaatan sumber daya kelautannya. Dalam mengatasi hal-hal tersebut, pemerintah membuat beberapa program untuk wilayah pesisir Kendal.

Program-program pengembangan wilayah pesisir selalu berkelanjutan setiap tahunnya.

Hasil AHP menyimpulkan bahwa wilayah pesisir Kabupaten Kendal memiliki banyak strategi yang dapat dilakukan dalam upaya menghadapi *Blue Economy*. Berdasarkan olah AHP strategi yang paling utama dilakukan adalah kriteria pemberdayaan masyarakat. Pentingnya pemberdayaan masyarakat dijalankan sebagai salah satu upaya menghadapi *Blue Economy*, karena pada kriteria ini merupakan langkah awal untuk menerapkan konsep *Blue Economy*. Diberdayakannya masyarakat adalah bekal untuk melaksanakan konsep baru tersebut. Dalam menerapkan *Blue Economy*, harus tercipta sumber daya manusia yang tergali potensinya agar siap dan bisa menjalankan kegiatan-kegiatan untuk menjalankan konsep itu secara maksimal. Empat strategi dalam kriteria pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir agar tercipta kelompok masyarakat yang mempunyai potensi serta bisa dipertanggungjawabkan.
2. Pelayanan usaha dan pemberdayaan masyarakat, supaya masyarakat pesisir bisa lebih mudah untuk melengkapi ataupun memulai usahanya serta lebih terarah.
3. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan, hal ini bisa melatih masyarakat agar bisa memanfaatkan sumber daya kelautan secara baik, sehingga ada kesiapan untuk menghadapi *Blue Economy*.
4. Pendampingan program grameen bank pesisir, dengan adanya ini bisa memudahkan masyarakat pesisir untuk mendapatkan modal tanpa harus dibebani persyaratan-persyaratan seperti bank pada umumnya.

Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan menjadi kriteria kedua yang dipilih oleh responden *key-persons* dalam upaya menghadapi *Blue Economy*. Hal ini dilakukan agar masyarakat pesisir bisa lebih tau dan terarah mengenai pengelolaan hasil perikanan, dengan demikian pengelolaan hasil perikanan

bisa tercapai secara optimal. Oleh karena itu akan tercipta industri-industri rumah tangga baru yang lebih inovatif. Strategi dalam kriteria optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan yaitu:

1. Pelatihan dan pengembangan pengolahan hasil perikanan, agar masyarakat bisa lebih mengerti bagaimana mengolah hasil perikanan dengan berbagai inovasi baru. Dengan demikian industri-industri rumah tangga pengolah ikan bisa berkembang dan semakin bertambah lagi.

2. Pengembangan dan peningkatan produk bernilai tambah hasil perikanan untuk bisa meningkatkan hasil olahan ikan dengan berbagai macam jenis, sehingga pemanfaatan hasil perikanan lebih maksimal.

3. Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan, hal ini merupakan yang terpenting untuk mulai mengembangkan pengolahan ikan. Semakin tercipta sarana dan prasarana maka secara tidak langsung pengolahan hasil perikanan akan bertambah dan lebih inovatif.

4. Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan (TPI), karena TPI sangat membantu para nelayan dan masyarakat untuk bisa melakukan kegiatan jual beli. Selain hal tersebut, TPI juga bisa menjadi tempat menabung untuk para nelayan khususnya, sehingga nelayan punya tabungan guna membeli perlengkapan ataupun kebutuhan untuk mencari ikan.

Peningkatan hasil perikanan menjadi kriteria ketiga yang dipilih oleh *key-persons* dalam upaya menghadapi *Blue Economy*. Hal ini merupakan hal penting, karena dengan meningkatnya hasil perikanan, maka produksi olahan ikan juga akan semakin banyak dan bervariasi. Strategi dalam kriteria pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Pengembangan budidaya perikanan, agar bisa melestarikan hasil perikanan.

2. Pengembangan perikanan tangkap merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya kelautan agar pemanfaatannya bisa berkelanjutan.

3. Pengembangan kawasan budidaya air laut dan air tawar, dengan hal ini hasil perikanan akan lebih terorganisir, dan apabila dapat dikelola dengan baik bisa menjadi tempat wisata alam yang menarik masyarakat luar daerah.

4. Pengadaan alat bantu penangkapan ikan merupakan hal yang paling berpengaruh pada jumlah hasil ikan yang didapat.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

Wilayah pesisir Kendal potensial dilihat dari potensi wisata, perikanan dan kelautan, industri, dan perdagangan. Oleh karena itu secara kepemilikan sumber daya kelautan sudah siap, namun sarana dan prasarana serta kebijakan dari pemerintah belum bisa mendukung. Peringkat kriteria yang menjadi prioritas dalam upaya menghadapi *Blue Economy* di wilayah pesisir Kendal adalah pemberdayaan masyarakat dengan bobot sebesar 0,413 dan *inconsistency ratio* sebesar 0,05 yang berarti hasil analisis tersebut teruji konsisten dan dapat diterima. Berdasarkan analisis AHP oleh keseluruhan *key-persons* dapat disimpulkan bahwa program dalam strategi menghadapi *Blue Economy* yang paling tinggi prioritasnya adalah program (B3) Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dengan bobot 0,162 dari kelompok program pemberdayaan masyarakat dan *inconsistency ratio* sebesar 0,05.

5.2. Saran

Dari beberapa kesimpulan diatas, maka dapat diberikan sejumlah saran sebagai berikut:

Program-program untuk wilayah pesisir seharusnya terlaksana dengan baik dan berkelanjutan, karena hal itu sangat mempengaruhi bagaimana kondisi lingkungan dan masyarakatnya. Seharusnya lebih banyak lagi dilakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan *Blue Economy*. Hal ini

dikarenakan agar masyarakat bisa mengenal *Blue Economy* dan mengetahui apa saja yang perlu dilakukan serta kelemahan dari konsep baru ini. Dalam mengembangkan wilayah pesisir sebaiknya masyarakat juga ikut berperan penting, sehingga akan tumbuh kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kegiatan dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, masyarakat tidak selalu mengeluhkan mengenai bantuan maupun perhatian dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal. 2012. *Kecamatan Dalam Angka Tahun 2012*. Kendal : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal. *Kendal Dalam Angka Tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011*. Kendal : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2009. *Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2009*. Jawa Tengah : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.
- Budiharsono. 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Jakarta: PT Pranadya Paramita.
- Cholique. 2007. Analisis Pengembangan Kota Pekalongan Sebagai Salah Satu Kawasan Andalan di Jawa Tengah. Universitas Diponegoro.
- Dahuri, Rokhmin. 2001. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. PT Pranadya Paramita. Jakarta.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal. 2012. *Perikanan Dalam Angka Tahun 2012*. Kendal : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal.
- Farida, Nova. 2006. *Peranan dan Dampak Sektor Perikanan dan Kelautan Terhadap Pembangunan Wilayah Kabupaten Kendal*. Universitas Diponegoro.
- Muhammad, Ali. 1994. *penelitian pendidikan*. Bandung. angkasa.
- Mulyadi S. 2007. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Mursal, Hakim. 2013. *Blue Economy Daerah berbasis Kelautan dan Perikanan*. Universitas Negeri Semarang.
- Nazir, M. 1999. *Metode Penelitian, Cetakan keempat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Parker, Nicholas. 2011. *Risk and Opportunities in addressing The Global Water Crisis. The Blue Economy*.
- Rekdale, Philip. 2013. *Ekonomi Biru Indonesia*. Jakarta: *Blue Economy* Indonesia.
- Saaty, T.Lorie. 1993. *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin, Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks*. Pustaka Binama Pressindo.
- Satria . 2002. *Pesisir dan Laut untuk Rakyat*. Bogor: IPB Press.
- Sudirman, Saad. 2012. *KKP Perkuat Ekonomi Desa Pesisir Melalui Program PDPT*. <http://kkp.go.id/index.php/tablet///arsip>. (20 Februari 2013).
- Tarigan. R. 2006. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Husein. 2002. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Union, European. 2012. *Blue Growth Opportunities for Marine and Maritime Sustainable Growth*. *Journal of Blue Economy*.